

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumberdaya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan dan lain - lain merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Penurunan ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Hutan merupakan sumberdaya alam terbarukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini karena hutan merupakan aset multiguna yang tidak saja menghasilkan produk produk seperti kayu, arang, pulp, dan lain-lain, tetapi juga memiliki nilai lain (*non-use*) seperti pelindung panas, pemecah angin (*windbreaks*), dan pelindung tanah dari bahaya erosi. Selain itu, hutan juga menjadi habitat bagi satwa dan hewan lain yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati (Fauzi, 2004).

Hutan memiliki banyak klasifikasi, salah satu diantaranya berdasarkan tujuan pengelolaannya yang dibedakan menjadi empat jenis, yaitu hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan konservasi (UU No.41 tahun 1999 pasal 6). Luas hutan di Indonesia mencapai 140,4 juta Ha, berarti 70% dari total luas daratan. Sekitar 30,7 juta Ha atau 27,69% dari total luas hutan diklasifikasikan sebagai hutan lindung, 18,8 juta Ha merupakan pelestarian alam atau taman nasional, 64,3 juta Ha sebagai hutan produksi, dan 26,6 juta Ha merupakan hutan terbuka yang digunakan untuk aktivitas non hutan seperti perkebunan, pemukiman, dan transmigrasi. Kenyataannya selama 50 tahun terakhir Indonesia telah kehilangan hutan asli sebesar 72% atau 64 juta Ha, dengan kerugian finansial akibat dari penebangan liar adalah Rp 30 triliun per tahun.

Hutan lindung memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Nilai ekonomi hutan lindung yang bersifat tidak bisa dinilai (*intangibile*) belum banyak dilakukan

penghitungan sehingga nilai jasa hutan lindung relatif rendah dan berakibat penghargaan atau pengelolaan hutan lindung menjadi kurang optimal. Kondisi hutan lindung Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, kondisi hutan lindung di Indonesia baik kualitas maupun kuantitas mengalami penurunan tajam sebagai akibat konflik lahan, penebangan liar, dan lainnya.

Institusi kehutanan formal di Indonesia menghadapi kebingungan dalam mengambil posisi bagaimana seharusnya sumberdaya hutan yang ada di muka bumi Indonesia dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan. Berbagai bencana yang berturut-turut terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air seperti banjir, kekeringan, tanah longsor adalah efek langsung dan tidak langsung dari fenomena penurunan fungsi dari hutan dan kawasan hutan lindung.

Salah satu kawasan hutan lindung di Indonesia adalah Gunung Lawu (tinggi 2806 mdpl) terletak di Jawa tengah tepatnya di Kabupaten Karanganyar yang terletak di antara $7^{\circ} 28' - 7^{\circ} 40'$ Lintang Selatan (LS) dan $110^{\circ} 40' - 110^{\circ} 70'$ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah administrasi 77.378,63 Ha atau 77,38 Km². Gunung ini memanjang dari Utara ke Selatan, dengan topografi bagian Utara berbentuk kerucut dengan puncak Argo (Hargo) Dumilah setinggi 3.265 Meter Diatas Permukaan Laut (mdpl). Sedangkan bagian Selatan sangat kompleks terdiri dari bukit-bukit heterogen dengan medan curam berliku dengan ketinggian sekitar 2.298 mdpl. Sebagai kategori hutan tropis, kawasan perhutanan di Lawu juga mempunyai karakter bentuk habitat alam yang sangat eksotis, dengan sedikitnya terdapat 10.000 jenis spesies tanaman.

Gunung Lawu juga sangat terkenal dengan puluhan ribu mata air yang ketika kemarau panjang sekalipun, nyaris debit air tidak pernah berkurang, Gunung lawu memiliki peran sangat penting bagi wilayah di sekitarnya yaitu sebagai: (1) Sumber mata air permukaan dan air tanah terutama untuk Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun; (2) Ekosistem tempat tumbuh fauna-flora khas kawasan Gunung Lawu; serta (3) Sentra perziarahan budaya tradisional Kejawen (Salim, 2005). Kondisi luas kawasan hutan di Kabupaten Karanganyar sebesar 7.635,48 Ha atau 9,87% luas kabupaten, terdiri dari Hutan Produksi seluas 126 Ha, Hutan Lindung seluas

7.509,48 Ha dan Hutan Konservasi seluas 293,6 Ha. Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung dikelola oleh Perum Perhutani KPH Surakarta dan Hutan Konservasi dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Tengah (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Karanganyar, 2010).

Di daerah lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar ditemukan indikasi semakin parah kerusakan hutan yang mengakibatkan tanah longsor dan banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau yang menyebabkan kebakaran hutan. Data yang tercatat di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Kebakaran Hutan di Gunung Lawu terjadi pada tahun 2002 seluas 6.284,24 Ha, tahun 2006 seluas 1.007 Ha, tahun 2009 seluas 1.370,7 Ha. Pada tahun 2011 telah terjadi tiga kali kebakaran yang mencapai luas 64,3 Ha dan pada tahun 2012 terjadi kebakaran pada lahan seluas 2 Ha. Meskipun kerugian secara ekonomis tidak signifikan namun kerugian ekologis sangat memprihatinkan, karena dari 33.150 Ha Hutan di 5 kabupaten di bawah KKPH (Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) yang terbakar justru hutan lindung yaitu sekitar 19.000 Ha.

Banyak kawasan penyangga atau daerah tangkapan air (*catchment area*) di daerah Gunung Lawu telah mengalami degradasi yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun akibat dari proses alam. Faktor penyebab lainnya adalah penambahan penduduk dan eksploitasi pemanfaatan lahan di sekitar lereng Gunung Lawu (Sutarno, 2005). Kerusakan hutan dan lahan juga terjadi sebagai akibat pengelolaan hutan dan lahan belum dilaksanakan secara baik. Pada umumnya disebabkan oleh intensitas penebangan liar secara tak terkendali serta kebakaran hutan yang terjadi di musim kemarau panjang. Sementara itu kerusakan lahan yang terjadi di luar kawasan hutan antara lain disebabkan oleh cara-cara membuka lahan untuk pertanian dengan sistem pembakaran yang berulang-ulang.

Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah lereng Gunung Lawu berakibat pada degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo khususnya sub DAS Samin. Banjir, kekeringan, erosi, dan sedimentasi mulai sering terjadi, hal ini diperkirakan karena menurunnya kondisi hutan. Selain itu

penegakan hukum yang masih lemah terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pemeliharaan lingkungan juga menjadi penyebab lain terjadinya kerusakan hutan. (Ismi dkk, 2012)

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya sumberdaya hutan tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: (1) masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (2) peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/ atau laporan.

Keberadaan masyarakat akan efektif jika peran mereka dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang ada ditingkatkan. Keterlibatan dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif akan meningkatkan mutu proses dan produk penataan ruang. Namun kenyataan yang ada, justru kesadaran masyarakat dan ketegasan dari pemangku kebijakan setempat (masyarakat sekitar Gunung Lawu) sangat minim sehingga pemanfaatan lahan kawasan pedesaan tidak berpijak pada keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumberdaya alam. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa banyak penduduk di sekitar hutan di kawasan Gunung Lawu merupakan warga miskin, dan seringkali kemiskinan dapat menjadi faktor pemicu kerusakan sumberdaya alam (Ismi dkk, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tampak bahwa hutan merupakan sebuah ekosistem yang bersifat integral. Pencapaian kelestarian fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi dari hutan belum tercapai, masih diperlukan upaya pengelolaan hutan secara tepat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat sangat diutamakan dalam penelitian ini. Sampai seberapa jauh keberdayaan masyarakat dalam mengelola hutan, karena tanpa masyarakat menjadi berdaya, apapun dan berapapun sumberdaya alam yang mereka kuasai akan jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak. Berapa nilai ekonomi jasa lingkungan hutan lindung dan bagaimana model pengelolaan sumberdaya khususnya hutan lindung berbasis masyarakat yang ideal menjadi hal penting yang perlu untuk diperhatikan.

Pengelolaan hutan yang arif akan mendukung kondisi hutan sehingga dapat tumbuh berdampingan secara lestari dengan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini perlu untuk segera dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tingkat kerusakan hutan lindung di Gunung Lawu?
2. Bagaimana bentuk kegiatan (aktivitas) masyarakat di hutan lindung di Gunung Lawu?
3. Bagaimana dampak keterlibatan masyarakat petani sekitar hutan lindung terhadap kondisi lingkungan social ekonomi pertanian di Gunung Lawu?
4. Berapa total nilai ekonomi jasa lingkungan hutan lindung Gunung Lawu baik menurut fungsi kawasan maupun manfaat yang hilang akibat tidak dikelola oleh masyarakat sekitarnya?
5. Bagaimana model pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat yang ideal di Gunung Lawu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh Strategi pengelolaan hutan lindung serta bagaimana menjaga kelestarian fungsi ekonomi dan fungsi ekologi dari hutan lindung di Gunung Lawu. Sementara itu tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi adanya kerusakan hutan lindung di Gunung Lawu.
2. Mengidentifikasi bentuk kegiatan masyarakat petani di hutan lindung Gunung Lawu.
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak keterlibatan masyarakat petani sekitar hutan lindung terhadap kondisi lingkungan sosial ekonomi pertanian.
4. Memformulasi dan mengetahui nilai jasa lingkungan hutan lindung di Gunung Lawu.

5. Mengembangkan dan memberikan rekomendasi model pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat yang ideal di Gunung Lawu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang akademis khususnya Ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
2. Dapat sebagai rekomendasi kepada pengambil keputusan dalam menentukan strategi pengelolaan lingkungan terutama pola pengelolaan lahan hutan lindung.
3. Bagi peneliti dapat sebagai tambahan pengetahuan dan informasi yang lebih mengenai pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan lahan sekitar hutan lindung.